Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
TAHETA Edisi IV/2020

- Pembukaan HUT BPK ke 74
  - Rencana Kerjasama BPK & UPR
- PTRLHP Smt II TA 2020
  - Kunjungan DPD RI ke BPK Kalteng
- Entry Meeting Pemeriksaan Smt II
  - Pelantikan IPKN
- Penyerahan LHP Kinerja dan Kepatuhan

PENYERAHAN LHP KINERJA DAN LHP KEPATUHAN ATAS PENANGANAN PANDEMI COVID-19 KEPADA LIMA PEMERINTAH DAERAH

Hari Jumat, 18 Desember 2020, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kota Palangka Raya, Pemerintah Kabupaten Barito Timur, dan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas serta Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Penyerahan LHP dilakukan secara daring (online) melalui video conference. Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Ade Iwan Ruswana, S.E., M.M. Ak., CSFA., CA. kepada Ketua DPRD dan Kepala Daerah atau yang mewakili. Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat struktural dan Fungsional Kantor Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah.Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan menyampaikan bahwa Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas penanganan pandemi COVID-19 bidang kesehatan TA 2020 dengan sasaran pemeriksaan ini meliputi proses pengelolaan atas Pengujian (Testing), Penelusuran Kasus (Tracing), Perawatan (Treatment) dan Edukasi serta Sosialisasi/ Komunikasi (Education/ Communication) dalam rangka penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19. Sedangkan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu ditujukan untuk menilai kepatuhan Pemerintah Daerah dalam menganani pandemi COVID-19 terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu pada aspek refocusing dan realokasi APBD, penanganan bidang kesehatan, penanganan bidang sosial, dan penanganan bidang ekonomi.Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, dapat disimpulkan bahwa kinerja atas penanganan pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kota Palangka Raya, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, dan Pemerintah Kabupaten Barito Timur adalah Cukup Efektif. Pemerintah Daerah dalam penanganan pandemi COVID-19 terdapat beberapa capaian keberhasilan, dan beberapa permasalahan signifikan yang perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Daerah untuk perbaikan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa kepatuhan atas penanganan pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Murung Raya adalah "Sesuai Dengan Pengecualian". Kesimpulan tersebut didasarkan atas masih adanya kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan baik pada aspek pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan maupun permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam laporan hasil pemeriksaan.Sebagai penutup, Kepala Perwakilan mengharapkan peran dari para pemilik kepentingan, dalam hal ini Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi dari permasalahan-permasalahan yang ditemui.

Biarlah pengalaman masa lalu kita menjadi tonggak petunjuk, dan bukan tonggak yang membelenggu kita

Bung Hatta

Redaksi

Penanggung Jawab	: Ade Iwan Ruswana
Redaktur	: Dionisius Yudianto
Editor	: Bambang Budi Purwanto
Web Admin	: Dica Surya Cardina
Web Developer	: Karunia Wibisono
Desain Grafis	: Achmad Anshari
Fotografer	: Muys
Pembuat Arikel	: Artha Magdalena Sitanggang
Sekretariat	: Nurul Latifah

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinisi Kalimantan Tengah
http://palangkaraya.bpk.go.id
Jalan Yos Sudarso 16 Palangka Raya

PEMBUKAAN RANGKAIAN KEGIATAN HARI ULANG TAHUN BPK KE-74

Jum'at, 13 November 2020, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan pembukaan rangkaian kegiatan HUT BPK ke 74 yang dilaksanakan secara daring. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Bpk. Ade Iwan Ruswana, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA beserta para pejabat struktural dan para pegawai. Kegiatan dihadiri secara virtual oleh seluruh Pimpinan BPK dan pegawai BPK mulai dari pejabat struktural, pejabat fungsional pemeriksa, dan pelaksana BPK.Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua BPK, Bpk. Dr.Agung Firman Sampurna,S.E.,M.Si.,CSFA Dalam sambutannya, Ketua BPK menyampaikan bahwa walaupun dalam masa pandemi covid-19 seperti sekarang ini, tidak menghalangi kita untuk meningkatkan solidaritas, kreatifitas, fleksibilitas, dan produktivitas. Perayaaan HUT BPK kali ini dilaksanakan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun diharapkan perayaan ini tidak akan mengurangi semangat dan kegembiraan yang selalu muncul dalam setiap perayaannya. Tema peringatan HUT BPK ke-74 adalah "BPK Tangguh, BPK Terpercaya".

Dalam laporannya, Sekretaris Jenderal BPK, Bpk. Bahtiar Arif, S.E., M.Fin., Ak., CSFA, CPA mengatakan bahwa rangkaian kegiatan ini akan diisi dengan berbagai macam perlombaan, diantaranya yaitu perlombaan dalam bidang kesenian dan kreatifitas, seperti fotografi, penulisan berita, dan vocal group. Selain itu juga ada perlombaan olahraga dan keterampilan, seperti pertandingan catur, bulu tangkis, dan panahan. BPK juga akan mengadakan family gathering. Sedangkan acara puncak dari rangkaian kegiatan ini adalah upacara HUT BPK dan syukuran.Untuk membangkitkan semangat dalam perayaan HUT BPK ke 74 kali ini, Panitia HUT BPK telah memilih sembilan unit kerja terdiri dari unit kerja Kantor BPK Pusat dan Kantor Perwakilan untuk menampilkan yel-yel melalui tempat kerja masing-masing. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menjadi salah satu yang terpilih untuk menampilkan yel-yel.

RENCANA KERJASAMA ANTARA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

Kamis 8 Oktober 2020, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Ade Iwan Ruswana, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA mengadakan pertemuan dengan Tim Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Palangka Raya (UPR). Pertemuan yang dilaksanakan di ruang VIP Kepala Perwakilan di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah dan dihadiri oleh para pejabat struktural BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam pertemuan tersebut Tim Dosen FEB melakukan diskusi dan meminta masukan dari BPK mengenai kurikulum pembelajaran mata kuliah Akuntansi dan Auditing. Hal tersebut bertujuan agar ilmu yang diperoleh mahasiswa benar-benar dapat di implementasikan dalam dunia kerja. Selain itu dalam pertemuan tersebut juga dibahas rencana kerjasama lainnya yaitu kegiatan Workshop maupun Kuliah Umum /BPK Goes to campus yang ditujukan kepada mahasiswa UPR. Rencana kerjasama tersebut bertujuan untuk mengenalkan BPK lebih mendalam kepada mahasiswa dan seluruh civitas akademika Universitas Palangka Raya terutama dalam bidang Pemeriksaan Keuangan Negara atau Daerah yang merupakan tugas pokok dari Badan Pemeriksa Keuangan.

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER II 2020

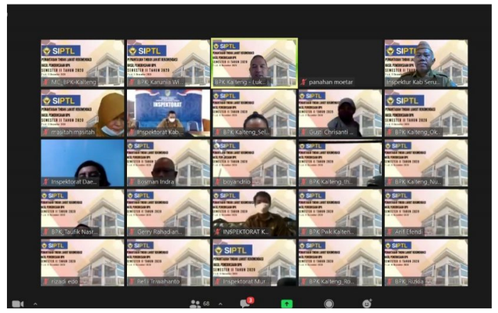

Senin, 7 Desember 2020 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan pembukaan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi hasil Pemeriksaan (PTLRHP) Semester II TA 2020 yang diikuti oleh Inspektur dan jajarannya pada 15 entitas di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah secara daring menggunakan aplikasi zoom. Kegiatan PTLRHP dilaksanakan selama 5 hari yaitu dari tanggal 7 s.d 14 Desember 2020. Acara dibuka oleh Kepala Subauditorat Kalimantan Tengah I, Bapak Lukman Hakim mewakili Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam sambutannya, Bapak Lukman Hakim menyampaikan agar pembahasan TLRHP kali ini memaksimalkan penggunaan aplikasi SiPTL dan media komunikasi on-line mengingat beberapa minggu terakhir kasus positif covid-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan. Selain itu disampaikan pula prosentase penyelesaian TLRHP pada semester sebelumnya (Semester I Tahun 2020) se-Provinsi Kalimantan Tengah adalah tindak lanjut telah sesuai rekomendasi sebesar 84,63%, tindak lanjut belum sesuai rekomendasi sebesar Rp11,86%, rekomendasi belum ditindaklanjuti sebesar 2,65%, dan rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebesar 0,86%.Kegiatan utama yang dilakukan oleh Tim Pemantauan adalah menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari entitas untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK. Hasil penelaahan diklasifikasikan dalam empat kategori, yaitu tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi (status 1), tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi (status 2), rekomendasi belum ditindaklanjuti (status 3), atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti (status 4). Atas pembahasan tindak lanjut yang telah dilaksanakan tersebut akan dilakukan reviu berjenjang. Untuk pengajuan usulan status 1 dan status 4 akan diajukan ke BPK Pusat untuk mendapatkan persetujuan dari Anggota VI BPK.

KUNJUNGAN KERJA KOMITE IV DPD RI DALAM RANGKA TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK SEMESTER I 2020

Selasa 8 Desember 2020, Kepala Subauditorat Kalteng I Bapak Lukman Hakim mewakili Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pertemuan dengan Komite IV DPD RI yang diwakili oleh Bapak Habib Said Abdurrahman. Pertemuan dilaksanakan dalam rangka Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI untuk membahas Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2020, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2020, dan Kerugian Daerah s.d Semester I Tahun 2020. Pertemuan dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Kalimantan Tengah dan dihadiri oleh Kepala Subauditorat Kalteng II, Kepala Subbagian Humas & Tata Usaha Kepala Perwakilan, Pengendali Teknis dan Pemeriksa Madya BPK Perwakilan Kalimantan Tengah. Kepala Subauditorat Kalteng I menyampaikan permasalahan yang ada dalam Pemeriksaan Semester I dituangkan dalam LHP BPK terkhusus pada Buku II Sistem Pengendalian Intern dan Buku III Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kamis, 3 Desember 2020, bertempat di Gedung Smart Province, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan paparan terkait komitmen, koordinasi, dan inovasi dalam layanan keterbukaan informasi publik pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan guna memenuhi undangan dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020. Kepala Perwakilan hadir didampingi oleh Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan beserta staf. Penilaian badan publik dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah. Pada sesi yang sama dalam kegiatan tersebut, hadir pula Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan pemaparan badan publik.Tahun ini adalah tahun kedua bagi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan tersebut. Pada Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Badan Publik memperoleh peringkat I dengan kategori "Menuju Informatif". Dalam paparannya, Kepala Perwakilan menjelaskan terkait upaya yang telah dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan layanan keterbukaan informasi publik, diantaranya dengan adanya koordinasi PPID BPK Perwakilan se-Indonesia, pengelolaan website, peningkatan layanan Pusat Informasi dan Komunikasi dalam melayani permintaan informasi dan pengaduan masyarakat, dan kegiatan media relation. Inovasi terbaru yang telah dilakukan sejak bulan September 2020 yaitu adanya e-PPID yang merupakan layanan online yang memudahkan bagi masyarakat dalam melakukan permintaan informasi dan pengaduan masyarakat, tanpa harus datang langsung ke kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah pemaparan yang dilakukan oleh Pimpinan BPK dan BPS, tim penilai melakukan sesi tanya jawab dengan Badan Publik terkait paparan yang telah dilakukan. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dapat menjaga komitmen dan berkesinambungan dalam melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan layanan keterbukaan informasi publik.

PELANTIKAN PENGURUS INSTITUT PEMERIKSA KEUANGAN NEGARA WILAYAH KALIMANTAN TENGAH

Senin (26/10/2020) Dewan Pengurus Nasional Institut Pemeriksa Keuangan Negara (DPN IPKN) menyelenggarakan "Pelantikan Pengurus Institut Pemeriksa Keuangan Negara Wilayah DKI Jakarta dan Kalimantan Periode 2020-2023" oleh Ketua Umum DPN IPKN, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A.,CIPM.,CSFA.,CPA secara virtual. Para calon pengurus IPKN Wilayah Kalimantan Tengah mengikuti prosesi pelantikan di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Acara pelantikan juga dihadiri secara virtual oleh para undangan diantaranya adalah Pengurus IPKN Nasional, para Ketua IPKN Wilayah, para Kepala Daerah dan Inspektur, Kepala Satuan Pengawas Internal BUMD, Ketua IAI Wilayah Kalimantan Tengah, dan Rektor Perguruan Tinggi di Kalimantan Tengah.

Kepengurusan IPKN Wilayah Kalimantan Tengah dijabat oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Ade Iwan Ruswana, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA sebagai Ketua IPKN Wilayah Kalimantan Tengah, para pejabat struktural dan fungsional pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, dan pihak eksternal BPK yaitu Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah, akademisi Universitas Palangka Raya, akademisi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, dan Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah sebagai dewan konsultatif. IPKN merupakan organisasi profesi pemeriksa keuangan negara yang telah diresmikan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2020. Organisasi ini diinisiasi oleh BPK RI selaku instansi pembina jabatan fungsional pemeriksa keuangan negara. "Keberadaan IPKN bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pemeriksa keuangan negara " kata Wakil Ketua BPK, saat memberikan pengarahan pada acara pelantikan Pengurus IPKN Wilayah DKI Jakarta dan Kalimantan periode 2020-2023 secara virtual. Anggota IPKN tidak hanya pemeriksa BPK, namun juga terbuka bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), pemeriksa yang tergabung dalam asosiasi profesi seperti IAI dan IAPI, serta akademisi yang memiliki perhatian terhadap pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara. Dengan dilantiknya pengurus IPKN Wilayah Kalimantan Tengah, diharapkan dapat mengembangkan profesi pemeriksa keuangan negara dan membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara/daerah.

ENTRY MEETING PEMERIKSAAN TERINCI ATAS KINERJA DAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENANGANAN COVID-19

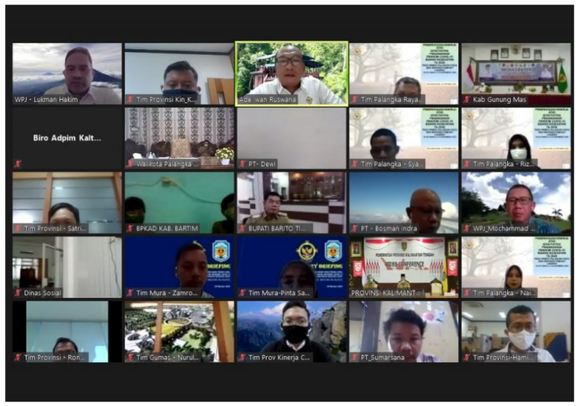

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan *entry meeting* pemeriksaan terinci atas kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) penanganan covid-19 pada enam Pemerintah Daerah secara daring. Kegiatan *entry meeting* dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB dan dihadiri oleh seluruh Pengendali Teknis Pemeriksaan, Tim Pemeriksa BPK, dan para Kepala Daerah atau yang mewakili. Pemeriksaan ini merupakan lanjutan dari pemeriksaan pendahuluan yang telah dilakukan sebelumnya pada bulan September 2020. Pemeriksaan kinerja atas penanganan covid-19 dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kota Palangka Raya, Pemerintah Kabupaten Barito Timur, dan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Sedangkan PDTT penanganan covid-19 dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupeten Murung Raya. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Perwakilan, Bapak Ade Iwan Ruswana, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA menyampaikan bahwa pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas penanganan covid 19 pada bidang Kesehatan. Pemeriksaan akan mencakup kegiatan testing, tracing, treatment, edukasi dan sosialisasi dalam penanganan pandemi COVID-19 di bidang kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Sedangkan untuk PDTT lebih menekankan pada kesesuaian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa khususnya dalam rangka penanganan covid-19 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Dalam pelaksanaannya, Tim pemeriksa BPK tetap akan memperhatikan protokol kesehatan. Apabila terdapat resiko yang tinggi, maka pemeriksa dapat menggunakan prosedur alternatif namun tetap memperhatikan keakuratan data. BPK mengharapkan kerjasama seluruh jajaran Pemerintah Daerah agar pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar. Dalam kesempatan ini, masing-masing Kepala Daerah atau yang mewakili menyampaikan perkembangan penanganan covid-19 beserta kesiapan data/dokumen yang dibutuhkan demi kelancaran pemeriksaan.